



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I KETUT WIRA ADNYANA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
3. NHK : 247658

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **540.604.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/36 m2 di KAB / KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI , Rp. 110.604.000
2. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **278.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2008, LAINNYA Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **53.149.663**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	18.334.165
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	836.607.562
F. HARTA LAINNYA	Rp.	82.687.430
Sub Total	Rp.	1.809.382.820
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.809.382.820

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.